



Penataan Aset dan Akses untuk Kemakmuran

Sekda Ketapang Buka Rakor GTRA

KETAPANG, SP - Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, menekankan untuk melakukan penataan kembali struktur pengusian, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset disertai penataan akses untuk kemakmuran Indonesia.

Perintah dalam Per-

aturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 itu ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Ketapang di Hotel Asana Nevada Ketapang, Kamis (24/11).

Sekda Ketapang, Alexander Wilyo SSTP MSI dalam sambutannya mewakili



RAPAT KOO
OGUS TUGAS REFORMA
KABUPATEN KETAPANG

“Bersinergi Mewujudkan Kabupaten Ketapang
sebagai Pusat Pengembangan dan Penerapan
Pengetahuan dan Keterampilan”



RAKOR - Sekda Ketapang Alexander Wilyo SSTP MSi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Ketapang di Hotel Asana Nevada Ketapang, Kamis (24/11).

Alexander Wilyo
Sekda Ketapang

impangan-penyimpangan dalam melaksanakan tugas,” ujar Sekda membacakan sambutan Bupati Ketapang.

Selanjutnya, dia berharap sinergitas GTRA Kabupaten dapat mewujudkan berbagai tujuan penyelenggaraan reforma agraria melalui penataan aset dan akses. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ketapang dapat ditingkatkan.

Rakor turut dihadiri Kepala Kantor Pertahanan Ketapang, Asisten I Setda Bidang Pemerintahan dan Kesra, Kepala Dinas PMP/TSP, Kepala Dinas Kesbangpol, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Ketapang, Tim GTRA, dan undangan lainnya.(teo/pk)

Saya minta seluruh perangkat daerah yang tergabung dalam Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Ketapang dapat bersinergi dalam melaksanakan tugas sesuai bidang masing-masing, dan menghindari penyimpangan-penyimpangan dalam melaksanakan tugas”

Bupati Ketapang, Martin Rantan SH MSos mengapresiasi terselenggaranya rakor tersebut. Dia berharap seluruh perangkat daerah melalui rapat ini dapat ber-

sinergi untuk melaksanakan reformasi agraria dengan baik, sesuai peraturan perundang-undangan.

“Saya minta seluruh perangkat daerah yang ter-